



# BAB VI – KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

## 6.1 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Kebijakan pembangunan kepariwisataan adalah arahan pembangunan yang dirumuskan dan ditetapkan untuk mencapai tujuan pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kebijakan pembangunan kepariwisataan mengintegrasikan aspek destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan. Kebijakan pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan arah tindakan pembangunan kepariwisataan yang bersifat multidimensi dan lintas sektor.

Kebijakan pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berfungsi:

1. Sebagai dasar dalam perumusan strategi pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Memberikan arah bagi perumusan rencana pengembangan perwilayahan pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terdiri dari rencana struktur perwilayahan pariwisata, rencana kawasan pengembangan pariwisata provinsi, dan rencana kawasan strategis pariwisata provinsi;
3. Memberikan arah bagi perumusan program pembangunan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Sebagai dasar dalam perumusan ketentuan pengendalian kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kebijakan pembangunan kepariwisataan dirumuskan berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan, visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta peraturan perundangan yang terkait.



**Gambar 6.1** Dasar Pertimbangan Perumusan Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, kebijakan pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah:

**A. Destinasi Pariwisata**

- a) Pembangunan perwilayahan pariwisata provinsi yang diarahkan untuk memperkuat citra sebagai destinasi pariwisata bahari dan budaya khas, meningkatkan daya saing produk pariwisata secara internasional, menciptakan keterpaduan pembangunan dan penyebaran perkembangan pariwisata yang lebih luas, memberikan nilai tambah yang positif bagi identitas provinsi sebagai wilayah pertambangan timah di Indonesia, memberikan perlindungan terhadap sumber daya alam dan budaya, peningkatan kualitas ekosistem alam, serta pemulihan kerusakan lingkungan.
- b) Pembangunan daya tarik wisata alam dan budaya berbasis pesisir, pantai, pulau-pulau kecil, formasi geologis batuan granit, perkebunan lada, adat-istiadat khas diarahkan untuk meningkatkan kualitas daya tarik wisata, mendorong pertumbuhan daya tarik wisata lainnya, serta membangun keterkaitan antara daya tarik wisata provinsi.
- c) Pembangunan keterpaduan sistem jaringan transportasi udara, laut, dan darat untuk meningkatkan aksesibilitas kepariwisataan antar kabupaten/kota di Kepulauan Bangka Belitung, antara Kepulauan Bangka Belitung dengan Jakarta, Bali, Batam, Medan, Makassar sebagai pintu gerbang utama Indonesia, serta dengan daerah sumber pasar wisatawan nusantara maupun mancanegara.
- d) Pembangunan prasarana umum dan fasilitas umum berstandar nasional dan internasional terutama pada daya tarik wisata provinsi, destinasi pariwisata provinsi, kawasan pengembangan

pariwisata provinsi, dan kawasan strategis pariwisata provinsi menuju destinasi pariwisata berdaya saing global.

- e) Pembangunan fasilitas pariwisata berstandar nasional dan internasional yang berciri khas lokal kabupaten/kota, menjunjung norma sosial dan budaya, nilai-nilai agama, mempertimbangkan daya dukung lingkungan, serta berorientasi pada pemenuhan kebutuhan berwisata masyarakat dan wisatawan.
- f) Pengembangan masyarakat agar dapat menjadi pelaku utama dalam pembangunan kepariwisataan yang berdaya saing global dan berkelanjutan.
- g) Pengembangan investasi pariwisata terpadu dan bertanggung jawab untuk membangun iklim usaha yang sehat dan berdaya saing, sekaligus memberikan manfaat luas bagi pengembangan masyarakat, perlindungan lingkungan alam, pelestarian budaya, dan pembangunan wilayah Provinsi.

## **B. Industri Pariwisata**

- a) Pengembangan industri pariwisata unggulan provinsi yang berdaya saing internasional, berciri khas lokal, berorientasi pada pengembangan masyarakat dan perekonomian lokal.
- b) Pembangunan iklim yang kondusif untuk mendorong industri pariwisata meningkatkan tanggung jawabnya terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya.
- c) Pengembangan kemitraan berjangka panjang dengan industri pariwisata nasional dan internasional dalam rangka mewujudkan industri pariwisata unggulan provinsi berstandar nasional dan internasional.
- d) Pembangunan sistem pengelolaan industri pariwisata yang terstruktur dan terpadu untuk membangun rantai nilai industri pariwisata yang kokoh.

## **C. Pemasaran Pariwisata**

- a) Pembangunan sistem dan lembaga pemasaran terpadu antara Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, antara Pemerintah dengan pelaku usaha, serta antara sektor pariwisata dan investasi daerah untuk membangun citra sebagai destinasi pariwisata bahari dan budaya berdaya saing global.
- b) Pembangunan keterpaduan produk dan pemasaran pariwisata dengan pemasaran pariwisata Indonesia untuk memperkuat citra destinasi pariwisata Kepulauan Bangka Belitung di tingkat nasional dan internasional.
- c) Pengembangan pasar wisatawan yang berkualitas didasarkan pada penelitian pasar yang berkesinambungan untuk meningkatkan peran dan posisi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kepariwisataan nasional.
- d) Pengembangan sistem pemasaran pariwisata berbasis teknologi informasi untuk menyediakan akses informasi dan komunikasi yang seluas-luasnya bagi wisatawan, meningkatkan kualitas dan

efektivitas promosi pariwisata, serta mengembangkan mekanisme evaluasi pemasaran pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

#### **D. Kelembagaan Pariwisata**

- a) Peningkatan koordinasi dan integrasi pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota di Kepulauan Bangka Belitung untuk mewujudkan satu kesatuan destinasi pariwisata bahari dan budaya berdaya saing global;
- b) Peningkatan kapasitas dan kinerja kelembagaan kepariwisataan di lingkungan pemerintahan dan industri pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar dapat melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan yang efektif dan optimal;
- c) Pembangunan sistem pengembangan sumber daya manusia pariwisata berkompentensi internasional yang berkesinambungan;
- d) Pembangunan sistem tata kelola pariwisata terpadu (pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi, dan media) yang handal untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya serta pembangunan masyarakat, sekaligus mengendalikan pembangunan kepariwisataan.

## **6.2 STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN**

Strategi pembangunan kepariwisataan adalah penjabaran kebijakan berupa rumusan langkah-langkah pencapaian yang lebih nyata untuk mewujudkan tujuan pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Strategi pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari strategi pembangunan destinasi pariwisata, strategi pembangunan industri pariwisata, strategi pembangunan pemasaran pariwisata, dan strategi pembangunan kelembagaan kepariwisataan.

### **6.2.1 STRATEGI PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA**

Strategi pembangunan destinasi pariwisata adalah penjabaran kebijakan terkait destinasi pariwisata berupa rumusan langkah-langkah untuk mewujudkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai destinasi pariwisata dalam dimensi keruangan. Strategi pembangunan destinasi pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki fungsi:

- a) sebagai dasar dalam merumuskan rencana pengembangan perwilayahan pariwisata, yang terdiri dari rencana struktur perwilayahan pariwisata, rencana kawasan pengembangan pariwisata, dan rencana kawasan strategis pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b) sebagai dasar dalam merumuskan program pembangunan destinasi pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c) sebagai acuan dalam pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi implementasi Ripparprov Kepulauan Bangka Belitung untuk aspek destinasi pariwisata.

Strategi untuk kebijakan pembangunan perwilayahan pariwisata provinsi meliputi:

- a) menetapkan Kota Pangkalpinang dan Tanjungpandan sebagai pusat pelayanan primer pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta Muntok, Sungailiat, Toboali, dan Pulau Mendanau sebagai pusat pelayanan sekunder pariwisata Daerah;
- b) membangun Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP) Wilayah Utara Kepulauan Bangka Belitung dan DPP Wilayah Selatan Kepulauan Bangka Belitung untuk mendorong pertumbuhan pariwisata yang seimbang dan terpadu antara wilayah utara dan selatan Daerah Provinsi;
- c) membangun Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) Muntok dan sekitarnya, KSPP Belinyu-Sungailiat dan sekitarnya, KSPP Pangkalpinang-Mendo Barat-Bangka Tengah, serta KSPP Pulau Belitung dan sekitarnya untuk memberikan nilai tambah yang positif bagi identitas provinsi sebagai wilayah pertambangan timah dan penghasil lada di Indonesia, memberikan perlindungan terhadap sumber daya alam dan budaya, peningkatan kualitas ekosistem alam, serta pemulihan kerusakan lingkungan;
- d) membangun Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPPP) Toboali dan sekitarnya, KPPP Gugusan Pulau di Selat Gaspar untuk membentuk citra sebagai destinasi pariwisata bahari dan budaya khas, meningkatkan daya saing produk pariwisata secara internasional, menciptakan keterpaduan pembangunan dan penyebaran perkembangan pariwisata yang lebih luas;
- e) memadukan pembangunan perwilayahan DPP, KPPP, dan KSPP Kepulauan Bangka Belitung dengan DPN Palembang-Bangka Belitung, KSPN Tanjungkelayang dan sekitarnya, KPPN Belinyu dan sekitarnya, KPPN Pangkalpinang-Sungailiat dan sekitarnya, serta KPPN Punai-Belitung dan sekitarnya; dan
- f) mengembangkan sistem mitigasi dan adaptasi terhadap bencana, kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan dan sektor lain di KSPP dan KPPP, serta dampak lingkungan akibat pariwisata di seluruh wilayah DPP.

Strategi untuk kebijakan pembangunan daya tarik wisata alam dan budaya berbasis pesisir, pantai, pulau-pulau kecil, formasi geologis batuan granit, perkebunan lada, adat-istiadat khas meliputi:

- a) menetapkan dan mengembangkan daya tarik wisata Provinsi berbasis pesisir, pantai, pulau-pulau kecil, formasi geologis batuan granit, perkebunan lada, adat-istiadat khas Daerah Provinsi;
- b) mengembangkan keterpaduan pembangunan dengan daya tarik wisata nasional dan daya tarik wisata kab/kota yang terletak di sekitar daya tarik wisata Daerah Provinsi;
- c) mengembangkan interpretasi sesuai tema daya tarik dan jalur wisata tematik DPP di Daerah Provinsi;
- d) merencanakan dan menerapkan pengelolaan pengunjung pada daya tarik wisata primer dan sekunder pada KSPP dan KPPP di Daerah Provinsi;
- e) merencanakan dan menerapkan informasi terpadu antara daya tarik wisata yang memiliki keterkaitan tema;



- f) mengembangkan program geowisata pada daya tarik wisata alam berbasis pesisir, pantai, pulau-pulau kecil, dan formasi geologis batuan granit;
- g) mengembangkan program wisata minat khusus bahari (selam, snorkeling, memancing di tengah laut) pada daya tarik wisata berbasis pantai dan pulau-pulau kecil; dan
- h) mengembangkan program wisata edukatif dan kreatif pada daya tarik wisata budaya berbasis pesisir, agrowisata lada dan lainnya, sejarah, dan adat-istiadat khas Daerah Provinsi;

Strategi untuk kebijakan pembangunan keterpaduan sistem jaringan transportasi udara, laut, sungai, dan darat meliputi:

- a) meningkatkan kualitas dan kapasitas pelayanan jaringan jalan menuju daya tarik wisata provinsi;
- b) membangun jaringan transportasi sungai untuk mendukung pariwisata;
- c) memadukan jaringan transportasi dengan lintas Sumatera;
- d) meningkatkan kualitas dan kapasitas pelayanan angkutan umum yang menghubungkan KSPP dan KPPP, serta pusat pelayanan primer dan sekunder pariwisata Daerah Provinsi;
- e) mengembangkan transportasi wisata untuk mendukung jalur wisata tematik di DPP;
- f) mengembangkan transportasi terpadu yang menghubungkan bandara/pelabuhan dengan pusat pelayanan primer dan sekunder pariwisata di Daerah Provinsi;
- g) mengembangkan rute dan frekuensi penerbangan langsung dari Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Bali, Batam, Medan, Palembang dan Balikpapan;
- h) mengembangkan rute dan frekuensi penerbangan dari Malaysia dan Singapura, dan negara sumber pasar wisatawan mancanegara lainnya;
- i) mengembangkan rute dan frekuensi pelayaran dari Jakarta, Batam, dan daerah sumber pasar wisatawan nusantara lainnya; dan
- j) menetapkan standar kenyamanan, keselamatan, dan keamanan bagi moda transportasi darat, sungai, dan laut di Daerah Provinsi.

Strategi untuk kebijakan pembangunan prasarana umum dan fasilitas umum berstandar nasional dan internasional meliputi:

- a) meningkatkan kesadaran kolektif para pemangku kepentingan terhadap standar nasional dan internasional bagi penyediaan dan pengelolaan prasarana umum dan fasilitas umum di daya tarik wisata provinsi, destinasi pariwisata provinsi, kawasan pengembangan pariwisata provinsi, dan kawasan strategis pariwisata provinsi;
- b) meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan energi listrik dan air bersih untuk pariwisata yang berdaya saing global; dan
- c) mengembangkan kemitraan dengan pihak swasta, pengelola daya tarik wisata, dan masyarakat dalam pembangunan prasarana umum dan fasilitas umum berstandar nasional dan internasional di daya tarik wisata provinsi, destinasi pariwisata provinsi, kawasan pengembangan pariwisata provinsi, dan kawasan strategis pariwisata provinsi.

Strategi untuk kebijakan pembangunan fasilitas pariwisata berstandar nasional dan internasional meliputi:

- a) meningkatkan kesadaran kolektif para pemangku kepentingan terhadap standar nasional dan internasional bagi penyediaan dan pengelolaan fasilitas pariwisata;
- b) menetapkan dan mengembangkan standar bangunan berciri khas lokal dan pelayanan berkarakter budaya dan nilai-nilai agama yang berlaku di masyarakat di Daerah Provinsi;
- c) membangun fasilitas akomodasi, fasilitas makan dan minum, fasilitas perjalanan wisata, dan fasilitas informasi yang berstandar internasional dan ramah lingkungan di Kota Pangkalpinang dan Tanjungpandan sebagai pusat pelayanan primer;
- d) mempercepat peningkatan pembangunan fasilitas akomodasi berkelas bintang di Kota Pangkalpinang dan Tanjungpandan sebagai pusat pelayanan primer pariwisata Daerah Provinsi;
- e) mempercepat peningkatan pembangunan fasilitas akomodasi berkelas nonbintang dan pondok wisata (*homestay*) berstandar nasional dan internasional di Muntok, Sungailiat, Toboali, dan Pulau Mendanau sebagai pusat pelayanan sekunder pariwisata Daerah Provinsi; dan
- f) mengendalikan pembangunan fasilitas pariwisata di daerah sempadan pantai dan sempadan lainnya dengan memperhatikan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan; dan
- g) mengembangkan pondok wisata (*homestay*) di KSPP dan KPPP di Daerah Provinsi.

Strategi untuk kebijakan pengembangan masyarakat agar dapat menjadi pelaku utama dalam pembangunan kepariwisataan meliputi:

- a) meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat terhadap pembangunan destinasi pariwisata berdaya saing global dan berkelanjutan;
- b) meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan berstandar nasional dan internasional di daya tarik wisata provinsi;
- c) meningkatkan peran Kelompok Sadar Wisata untuk mendukung pengelolaan KSPP dan KPPP yang berdaya saing global; dan
- d) menguatkan peran masyarakat dalam pengembangan tata kelola destinasi pariwisata berkelanjutan di KSPN Tanjung Kelayang dan sekitarnya.

Strategi untuk kebijakan pengembangan investasi pariwisata terpadu dan bertanggung jawab meliputi:

- a) mengembangkan mekanisme keterpaduan investasi pariwisata, perdagangan, dan bidang lainnya di Daerah Provinsi;
- b) menetapkan dan mengembangkan regulasi investasi yang berorientasi pada pengembangan masyarakat, perlindungan lingkungan, pelestarian budaya, dan percepatan pembangunan daerah; dan
- c) mengembangkan mekanisme pengendalian investasi pariwisata berbasis penelitian untuk membangun iklim usaha yang sehat dan berdaya saing, serta berwawasan lingkungan dan budaya.

## 6.2.2 STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

Strategi pembangunan industri pariwisata adalah penjabaran dari kebijakan pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang industri pariwisata, yang merupakan rumusan langkah-langkah yang ditetapkan untuk pembangunan industri pariwisata dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Strategi pembangunan industri pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki fungsi:

- a) sebagai dasar dalam merumuskan program fasilitasi dan pengembangan industri pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b) sebagai acuan dalam pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi implementasi Ripparprov Kepulauan Bangka Belitung untuk aspek industri pariwisata.

Strategi atas kebijakan pengembangan industri pariwisata unggulan provinsi meliputi:

- a) meningkatkan kesadaran usaha pariwisata yang berstandar nasional dan internasional terhadap bangunan berciri khas lokal, serta nilai-nilai budaya dan agama yang dianut masyarakat;
- b) mengembangkan kualitas produk industri kecil dan menengah yang dapat memperkuat rantai nilai industri pariwisata berdaya saing internasional di Daerah Provinsi;
- c) mengembangkan kemitraan antara industri pariwisata berdaya saing internasional dengan industri kecil dan menengah di Daerah Provinsi.

Strategi atas kebijakan pembangunan iklim yang kondusif untuk mendorong industri pariwisata meningkatkan tanggung jawabnya terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya meliputi:

- a) mengembangkan pedoman penerapan tanggung jawab terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya bagi usaha pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b) menerapkan dan mengembangkan insentif dan disinsentif bagi usaha pariwisata berdasarkan upaya yang telah dilakukan untuk lingkungan alam yang berkelanjutan, pengembangan sosial, dan pelestarian budaya;
- c) mengembangkan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program tanggung jawab lingkungan yang dilakukan usaha pariwisata.

Strategi kebijakan pengembangan kemitraan berjangka panjang dengan industri pariwisata nasional dan internasional meliputi:

- a) mengembangkan mekanisme komunikasi antara industri pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan industri pariwisata nasional dan internasional.
- b) menerapkan dan mengembangkan insentif bagi usaha pariwisata yang membangun kemitraan jangka panjang dengan industri pariwisata nasional dan internasional dalam penerapan standar nasional dan internasional usaha pariwisata.

Strategi kebijakan pembangunan sistem pengelolaan industri pariwisata yang terstruktur dan terpadu meliputi:



- a) mengembangkan mekanisme komunikasi antara koordinasi usaha-usaha pariwisata berstandar nasional dan internasional di Daerah Provinsi;
- b) menerapkan dan mengembangkan prosedur pengelolaan industri pariwisata yang sama dan terpadu untuk pengelolaan produk berdaya saing, pengelolaan dampak, dan promosi produk;
- c) mengembangkan pemantauan dan evaluasi penerapan sistem pengelolaan industri pariwisata yang terdiri dari mekanisme komunikasi dan koordinasi serta prosedur pengelolaan industri pariwisata yang sama dan terpadu.

### **6.2.3 STRATEGI PEMASARAN PARIWISATA**

Strategi pemasaran pariwisata adalah penjabaran kebijakan pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang pemasaran pariwisata. Strategi pemasaran pariwisata merupakan rumusan langkah-langkah yang ditetapkan untuk pengembangan pemasaran pariwisata dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan. Strategi pemasaran pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki fungsi:

- a) sebagai dasar dalam merumuskan program pemasaran pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan
- b) sebagai acuan dalam pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi implementasi Ripparprov Kepulauan Bangka Belitung untuk aspek pemasaran pariwisata.

Strategi untuk kebijakan sistem dan lembaga pemasaran terpadu antara Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, antara Pemerintah dengan pelaku usaha, serta antara sektor pariwisata dan investasi daerah meliputi:

- a) memadukan program pemasaran pariwisata terpadu di KSPP dan KPPP;
- b) membangun jejaring nasional dan internasional melalui kemitraan berjangka panjang dalam pemasaran pariwisata Daerah Provinsi;
- c) mengoptimalkan peran dan fungsi Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagai lembaga kemitraan pemasaran terpadu;
- d) mengembangkan mekanisme komunikasi dan koordinasi pemasaran pariwisata Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Daerah Provinsi, antara Pemerintah dengan pelaku usaha;
- e) mengembangkan perencanaan pemasaran terpadu sektor pariwisata dan investasi daerah untuk membangun citra sebagai destinasi pariwisata bahari dan budaya berdaya saing global.

Strategi untuk kebijakan pembangunan keterpaduan produk dan pemasaran pariwisata dengan pemasaran pariwisata Indonesia meliputi:

- a) mengembangkan branding dan peta jalan pembangunan branding pariwisata Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan produk pariwisata yang menjadi identitas Kepulauan Bangka Belitung;
- b) mengembangkan teknik dan media promosi pariwisata terpadu dengan pariwisata nasional.

Strategi untuk kebijakan pengembangan pasar wisatawan yang berkualitas didasarkan pada penelitian pasar yang berkesinambungan meliputi:

- a) menetapkan target jumlah wisatawan berdasarkan kecenderungan pertumbuhan kunjungan wisatawan Kepulauan Bangka Belitung, angka target nasional, dan kondisi kepariwisataan yang diharapkan di masa yang akan datang;
- b) menetapkan pasar wisatawan asal Jakarta dan Pulau Jawa, Sumatera bagian selatan, serta pelajar/mahasiswa di Kepulauan Bangka Belitung dan Sumatera Selatan sebagai pasar utama untuk wisatawan nusantara Kepulauan Bangka Belitung, serta komunitas fotografi, geowisata, budaya sebagai pasar sekunder wisatawan nusantara Kepulauan Bangka Belitung;
- c) menetapkan penduduk dan wisatawan di Singapura, Malaysia, serta penduduk Tiongkok sebagai pasar utama wisatawan mancanegara, serta penduduk Australia, Jerman, Belanda, dan negara Eropa lainnya sebagai pasar sekunder pariwisata Kepulauan Bangka Belitung;
- d) mengembangkan penelitian pasar wisatawan yang berkesinambungan untuk mengetahui segmen pasar potensial, persepsi, kebutuhan, dan preferensinya terhadap pariwisata Kepulauan Bangka Belitung.

Strategi untuk kebijakan pengembangan sistem pemasaran pariwisata berbasis teknologi informasi meliputi:

- a) mengembangkan sistem pendataan berbasis teknologi informasi untuk pengembangan informasi dan pemasaran pariwisata;
- b) mengembangkan sistem promosi dan pelayanan pariwisata berbasis teknologi informasi;
- c) mengembangkan sistem aplikasi untuk evaluasi pemasaran pariwisata Daerah Provinsi.

#### **6.2.4 STRATEGI KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN**

Strategi kelembagaan kepariwisataan merupakan rumusan langkah-langkah yang ditetapkan untuk pengembangan kelembagaan kepariwisataan dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan. Strategi kelembagaan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki fungsi:

- a) sebagai dasar dalam merumuskan program pembangunan kelembagaan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b) sebagai acuan dalam pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi implementasi Ripparprov Kepulauan Bangka Belitung untuk aspek kelembagaan kepariwisataan.

Strategi untuk peningkatan integrasi dan koordinasi pembangunan kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota meliputi:

- a) mengembangkan mekanisme koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan tahunan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mendukung pembangunan Kepulauan Bangka Belitung sebagai destinasi pariwisata bahari dan budaya berdaya saing global;
- b) mengembangkan mekanisme dukungan Pemerintah Provinsi terhadap program/kegiatan lintas sektor dan kabupaten/kota dalam rangka sinergitas pembangunan kepariwisataan Kepulauan Bangka Belitung;
- c) mengembangkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan terpadu

kabupaten/kota di Daerah Provinsi.

Strategi untuk kebijakan peningkatan kapasitas dan kinerja kelembagaan kepariwisataan meliputi:

- a) mengembangkan program prioritas bersama Pemerintah Provinsi dengan industri pariwisata Kepulauan Bangka Belitung;
- b) mengembangkan struktur kelembagaan pemerintahan Daerah Provinsi untuk mendukung perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan destinasi pariwisata berdaya saing global;
- c) meningkatkan peran asosiasi industri pariwisata dan asosiasi pelaku pariwisata dalam pelaksanaan program/kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi di bidang kepariwisataan;
- d) mengembangkan sistem perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan pelaksanaan pembangunan kepariwisataan terpadu yang ditetapkan dengan peraturan perundangan.

Strategi untuk kebijakan pembangunan sistem pengembangan sumber daya manusia pariwisata berkompentensi internasional meliputi:

- a) mengembangkan sistem sertifikasi bagi SDM pariwisata dan masyarakat luas yang terlibat dalam pembangunan kepariwisataan Kepulauan Bangka Belitung;
- b) mengembangkan sistem pendidikan kepariwisataan berbasis kompetensi internasional;
- c) mengembangkan mekanisme insentif bagi SDM pariwisata berkompentensi internasional.

Strategi untuk kebijakan pembangunan sistem tata kelola pariwisata terpadu (pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi, dan media) yang handal meliputi:

- a) meningkatkan kesadaran kolektif seluruh pemangku kepentingan terhadap tata kelola pariwisata terpadu di KSPP dan KPPP Kepulauan Bangka Belitung;
- b) menetapkan dan menerapkan sistem pengelolaan pariwisata terpadu pada pengelolaan komponen-komponen kepariwisataan untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya serta pembangunan masyarakat, sekaligus mengendalikan pembangunan kepariwisataan;
- c) membentuk dan mengembangkan organisasi tata kelola destinasi pariwisata terpadu di KSPP dan KPPP Daerah Provinsi;
- d) mengembangkan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola pariwisata terpadu Kepulauan Bangka Belitung.